

BAB VI

KESIMPULAN

VI.1 Kesimpulan

Inisiasi kerja sama *sister city* Pemerintah Kota Metropolitan Seoul dan Pemerintah Kota Bandung yang diawalnya diinisiasikan oleh kunjungan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menemui Walikota Seoul Park Won Soon pada tahun 2014 merupakan suatu keputusan kebijakan kerja sama yang tepat. Sebabnya, Pemerintah Kota Metropolitan Seoul merupakan kota maju yang telah berhasil melakukan pembangunan di berbagai bidang yang menjadikan Pemerintah Kota Seoul saat ini dapat dikatakan sebagai Kota Pintar. Hal ini dapat memberikan banyak keuntungan bagi kota Bandung berupa masukan pengalaman dan bantuan pembangunan dari Pemerintah Kota Seoul yang telah berhasil menerapkan Kota Pintar dimana Kota Bandungpun masih membutuhkan banyak pembangunan di berbagai bidang.

Kerja sama *sister city* ini disepakati berfokus pada kerja sama pembangunan *smart city* dimana salah satu bidang kerja samanya adalah bidang e-Government. Kota Seoul yang merupakan kota dengan pembangunan e-Government terbaik di dunia berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2014 merupakan partner kerja sama yang berpotensi memberikan pengaruh baik bagi Kota Bandung yang pembangunan e-Government-nya belum sempurna.

Kerja sama yang telah dilakukan sejak tahun 2015 ini pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan harapan awal untuk membantu dan mempercepat pembangunan e-Government Kota Bandung. Pembangunan e-Government bukan saja meliputi pembangunan pelayanan yang baik dalam pemerintahan, tetapi juga meliputi pembangunan kemampuan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi yang memadai seperti akses internet, pembuatan aplikasi dan website pelayanan pemerintahan hingga penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelayanan pemerintahan dan pelayanan secara online tersebut. Pada kenyataannya kerja sama e-Government ini hanya berjalan pada dua tahun pertama saja. Implementasi kerja samanya juga hanya meliputi satu bidang saja yaitu pelatihan sumber daya manusia dan pertukaran staff Tax Department Bandung dan Pegawai BAPPEDA Kota Bandung.

Tidak berjalannya kerja sama di bidang e-Government ini tidak semata-merta karna kelalaian dari kedua Pemerintah Kota, tetapi juga banyak faktor pendukung tidak berjalannya kerja sama ini. Dimulai dari permasalahan perbedaan kedudukan antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul dimana Kota Seoul merupakan Ibukota dari Korea Selatan sedangkan Kota Bandung hanya merupakan Ibukota dari salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat. Perbedaan kedudukan ini menyebabkan banyak perbedaan yang dihadapi seperti karakteristik kota, permasalahan yang dihadapi, karakteristik masyarakat, hingga ketersediaan sumber daya dan teknologi di kedua kota.

Selain itu kerja sama ini tidak berjalan secara optimal disebabkan oleh dana pembangunan yang tidak mencukupi. Pemerintah Kota Seoul sempat memberikan opsi bantuan pembangunan teknologi pembayaran pajak online Fintech, tetapi Pemerintah Kota Bandung harus menolak tawaran tersebut karna kurangnya dana pembangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung. Tidak seperti bidang lain, kerja sama bidang e-Government tidak didukung obantuan dana pembangunan dari pihak Pemerintah Kota Seoul ataupun pihak swasta Kota Seoul yang mengharuskan Kota Bandung membayar pembangunannya secara penuh. Pembangunan aplikasi Fintech ini dirasa belum menjadi suatu prioritas bagi pembangunan yang ada di Kota Bandung.

Kerja sama antara Kota Seoul dan Bandung yang dimulai atas inisiasi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjadi masalah bagi keoptimalan kerja sama e-Government. Fokus kebijakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kerap menekankan untuk memanfaatkan internet dan teknologi secara maksimal bagi Bandung dengan memiliki satuan sistem pelayanan masyarakat yang lengkap dan efektif yang menjadikan pembangunan e-Government merupakan bidang yang digenjot sebagai fokus pembangunan Kota Bandung. Selain itu saat masa kepemimpinannya, Wali kota Ridwan Kamil juga sangat memaksimalkan kerja sama internasional, tidak terkecuali kerja sama *sister city* dengan Kota Seoul di bidang e-Government. Berbeda dengan Wali Kota Bandung Ridwal Kamil, Walikota Bandung yang baru yaitu Wali Kota M. Oded Danial berfokus pada pembangunan infrastruktur dalam kota untuk mengatasi masalah kemacetan di dalam kotanya. Bukan berarti mengabaikan bidang lainnya, tetapi terlihat dari kerja

Ivonne Chandra Dewi, 2022

KERJASAMA SISTER CITY BANDUNG – SEOUL PERIODE TAHUN 2016-2020 DI BIDANG E-GOVERNMENT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

sama dengan Kota Seoul yang juga berfokus pada pembangunan tata kota yaitu pembangunan infrastruktur jembatan layang di beberapa titik kota Bandung.

Munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 juga menjadi pendorong kerja sama ini tidak berjalan secara optimal. Penanggulangan COVID-19 ini mengubah seluruh fokus semua aktor internasional, tidak terkecuali Pemerintah Kota Seoul dan Bandung. Kedua kota berfokus pada pencegahan dan pencarian jalan keluar dari berbagai masalah baru yang dihadapi oleh internal kotanya. Hal ini menyebabkan tertundanya hampir seluruh kerja sama internasional yang dijalani oleh masing-masing kota, tidak terkecuali kerja sama e-Government antara Bandung – Seoul.

VI.2 Saran

Peneliti menyarankan untuk akademisi lain melakukan penelitian mengenai kerja sama sister city ini karena selain kerja sama ini merupakan kerja sama yang aktif, tetapi juga masih banyak bidang lain yang masih memiliki kekosongan penelitian. Selain itu dalam pencarian data untuk penelitian juga sangat didukung oleh Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Bandung yang akan memudahkan akademisi lain untuk melakukan penelitian.

Kerja sama pembangunan e-Government antara Kota Bandung dan Seoul memiliki banyak potensi kerja sama yang dilakukan untuk menghasilkan hasil yang sesuai harapan kerja sama, tetapi hal itu sulit dicapai apabila kedua kota yang terlibat tidak memiliki komitmen yang bulat dalam pelaksanaan kerja sama. Peneliti menyarankan bagi kedua pemerintah kota untuk lebih memberikan komitmen dan perhatiannya terhadap kerja sama ini agar dilakukan lebih aktif lagi karena sebenarnya kerja sama ini bisa dilakukan karena keduanya sudah memiliki sumber daya yang memadai.

Kurangnya komitmen dari kedua aktor ini dipengaruhi oleh aturan dalam implementasi kerja sama yang tidak jelas dan bersifat dinamis pada Memorandum of Understanding ataupun Letter of Intent kerja sama tersebut yang membuat kurang jelasnya *framework* kerja sama yang mengatur bidang-bidang mana saja yang ingin dikerjakan samakan, pihak-pihak yang terlibat, dan terutama hasil konkrit yang ingin dicapai. Tidak adanya bidang dan pihak atau departemen yang jelas ini

membuat sulitnya menemukan penanggung jawab khusus kerja sama *e-government*.

Dalam upaya pengoptimalan kerja sama juga dibutuhkan dana yang besar. Penulis menyarankan agar kedua kota saling berpartisipasi menyiapkan dana dengan menarik investor swasta dari masing-masing kota ataupun dengan dana pembangunan daerahnya. Sebab dana pembangunan infrastruktur dan aplikasi ini dapat menjadi investasi masa depan bagi pengurangan pengeluaran dalam pelayanan pemerintahan di Kota Bandung.